

Implementasi Kerjasama Indonesia – Australia di Sektor Jasa Pendidikan Tinggi dalam Kerangka IA-CEPA 2020-2024

Yulan Adi Nugroho

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310424001@mahasiswa.upnvj.ac.id

Nurmasari Situmeang

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id

Mansur

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: mansurjuned@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to determine the cooperation between Indonesia and Australia in the higher education services sector within the IA-CEPA framework through the Partnership for Australia - Indonesia Research (PAIR) program in 2020-2024. This research is motivated by the results of the ratification of the Indonesia - Australia cooperation in the higher education services sector within the framework of the Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) through the Partnership for Australia - Indonesia Research (PAIR) program in 2020-2024. This study uses the concepts of international cooperation, educational cooperation, the CEPA concept, and the concept of partnership. This research method is a qualitative research method with a descriptive approach using case studies. The main data collection method uses literature study techniques collected from books, articles, news pages, and official pages of related organizations. The results of this study are the dynamics of Indonesia-Australia cooperation in the higher education services sector within the IA-CEPA framework through the Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) program 2020-2024 which can be seen from the sub-points of partnership, investment, increasing competitiveness, market access, and recognition.

Keywords: International Cooperation, CEPA, Higher Education, Partnership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama Indonesia – Australia di sektor jasa pendidikan tinggi dalam kerangka IA-CEPA 2020-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi hasil rarifikasi kerjasama Indonesia - Australia di sektor jasa pendidikan tinggi dalam kerangka Indonesia - Australia *Comprehensive Economic Partnershipagreement* (IA-CEPA) Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional, kerjasama pendidikan, konsep CEPA, dan konsep kemitraan atau *partnership*. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan studi kasus. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Hasil penelitian ini adalah dinamika kerjasama Indonesia – Australia di sektor jasa pendidikan tinggi dalam kerangka IA-CEPA Tahun 2020-2024 yang bisa dilihat dari sub poin kemitraan, investasi, peningkatan daya saing, akses pasar, dan rekognisi.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, CEPA, Pendidikan Tinggi, Kemitraan

Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam bidang layanan pendidikan tinggi yang difasilitasi oleh Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Kerjasama tersebut menjadi semakin penting, mengingat peran strategis pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara. Di era global, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai pilar penguatan hubungan bilateral serta peningkatan daya saing di kancah internasional. (Chowdhury, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian mengenai kerjasama Indonesia-Australia di sektor jasa pendidikan tinggi dalam kerangka Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) mencakup beberapa aspek penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, meskipun IA-CEPA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pendidikan antara kedua negara, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Misalnya, perbedaan dalam sistem pendidikan dan kurikulum

antara Indonesia dan Australia dapat menjadi penghalang bagi integrasi yang lebih mendalam (Mahfud et al., 2021b; Michie, 2019). Selain itu, meskipun kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang kurikulum Australia dan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang dihasilkan (Alfiano et al., 2022).

Selanjutnya, permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan dalam manfaat yang diperoleh dari kerjasama ini. Meskipun Indonesia berharap untuk meningkatkan ekspor pendidikan dan menarik lebih banyak mahasiswa internasional, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit dalam neraca perdagangan pendidikan dengan Australia setelah penerapan IA-CEPA (Anfasa, 2023b). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh Indonesia dari kerjasama ini mungkin tidak sebanding dengan yang diperoleh Australia, yang dapat menghambat kemajuan dan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana kerjasama ini dapat dioptimalkan agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang seimbang. Akhirnya, penelitian lebih

lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam kerjasama pendidikan tinggi ini, serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebijakan pendidikan, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan (Alfiano et al., 2022; Herlina, 2021).

Dengan memahami konteks dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka IA-CEPA. Berdasarkan perkembangan tersebut, penulis berupaya menelusuri lebih lanjut dan berkembang terhadap Kerjasama Indonesia - Australia Di Sektor Jasa Pendidikan Tinggi Dalam Kerangka Indonesia - Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) Melalui Program *The Partnership For Australia - Indonesia Research* (PAIR) Di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap kolaborasi Indonesia dan Australia di bidang jasa pendidikan tinggi dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–

Australia (IA-CEPA) melalui *Program The Partnership for Australia–Indonesia Research* (PAIR) di Sulawesi Selatan pada periode 2020–2024.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep-konsep seperti Kerjasama Internasional, Kerjasama Pendidikan, Tinjauan Mengenai CEPA, dan Konsep Kemitraan atau *Partnership*.

Metode Penelitian

Kemudian, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai landasan metodologis. Pendekatan kualitatif merupakan cara pengumpulan informasi yang menghasilkan data deskriptif, mencakup ungkapan tertulis maupun verbal dari orang-orang serta tindakan yang bisa diobservasi. Ciri khas yang menonjol dalam metode ini meliputi pemanfaatan data asli dari lapangan (natural setting), menitikberatkan pada penggambaran rinci, dan mengutamakan tahapan pelaksanaan dibandingkan capaian final. Sementara itu, proses analisis dalam pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi pola induktif, yang menempatkan interpretasi arti sebagai aspek utama (Lexy J. Moleong, 2006).

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber utama

didapatkan melalui penelitian langsung di lokasi penelitian. Metode perolehan data primer mencakup kegiatan observasi serta pelaksanaan wawancara dengan berbagai pihak terpercaya yang memahami topik pembahasan. Rangkaian wawancara diselenggarakan dengan sejumlah perwakilan dari berbagai lembaga resmi, antara lain, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) dengan Dengan Direktur Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Bapak Mochamad Rizalu Akbar, S.Ip, Ma. Diwakilkan Oleh Tim Negosiator Perundingan Perdagangan Jasa, dan Australia-Indonesia Centre (AIC) dengan Dengan Indonesia Director Of The Australia-Indonesia Centre, Mr. Kevin Evans

Adapun perolehan sumber data sekunder dilakukan melalui cara tidak langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data ini menerapkan metode penelitian literatur sebagai instrumen utama, dengan memanfaatkan berbagai referensi seperti buku, artikel, portal berita, serta situs web resmi milik institusi-institusi yang berhubungan.

Tahap berikutnya se usai pengumpulan data kualitatif ialah pelaksanaan analisis oleh peneliti. Ketika mempelajari berbagai

sumber seperti transkrip wawancara, berkas dokumen resmi, maupun informasi daring, seorang peneliti akan memahami bahwa data kualitatif memungkinkan beragam penafsiran serta penggunaan instrumen analisis yang bermacam-macam.

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini mengambil beberapa lokasi sebagai tempat penelitian, mencakup berbagai institusi pemerintah dan pendidikan. Adapun tempat-tempat tersebut meliputi kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI), dan Australia-Indonesia Centre (AIC).

Pembahasan

Sulawesi Selatan, pusat pendidikan terkemuka di Indonesia timur, merupakan rumah bagi banyak universitas berkembang, terutama universitas swasta. Tingkat persaingan yang tinggi ini menyulitkan universitas untuk menarik calon mahasiswa. Untuk mengatasi hal ini, universitas harus memanfaatkan kekuatan dan potensi mereka untuk menciptakan daya tarik yang menarik. Namun, universitas yang kurang memiliki kapasitas dan daya saing untuk bersaing secara efektif akan menghadapi konsekuensi dari persaingan ini, seperti kekurangan mahasiswa. Untuk memastikan keberlangsungan mereka, universitas harus

unggul dengan memahami lebih dalam sikap dan perilaku mahasiswa sebagai konsumen pendidikan tinggi (Sawaji, 2019).

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen sebagian besar telah mendorong perusahaan untuk memahami perilaku konsumen, khususnya proses pengambilan keputusan pembelian yang kompleks. Proses pengambilan keputusan konsumen dan hasilnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: 1) situasi pembelian, 2) pengaruh psikologis (kepribadian, motivasi, persepsi, dan proses pembelajaran), dan 3) pengaruh sosial (strata sosial, kelompok referensi, budaya, dan keluarga). (Sawaji, 2019).

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen perguruan tinggi di wilayah Makassar masih belum terakreditasi. Persentase ini juga berlaku untuk kampus-kampus di seluruh Sulawesi Selatan (Sulsel). Khususnya, institusi-institusi yang tidak terakreditasi ini terutama berfokus pada akademi kesehatan. Salah satu alasan utama di balik kurangnya akreditasi ini adalah beban keuangan yang substansial yang terkait dengan proses tersebut, terutama untuk akademi dengan kurang dari 100

mahasiswa. Kampus-kampus yang tidak terakreditasi ini sering dianggap kurang ideal karena kurangnya akreditasi. Selain itu, beberapa akademi kesehatan di Makassar belum mendapatkan akreditasi karena konversi ke program LAM PT (Lisensi Kedokteran Terapan) menimbulkan biaya yang signifikan, dan mereka kekurangan pendaftaran mahasiswa yang memadai (Putri Safira Pitaloka, 2023).

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Mereka menyarankan agar perguruan tinggi tersebut bergabung dengan perguruan tinggi lain yang telah terakreditasi. Dengan demikian, jumlah perguruan tinggi yang belum terakreditasi dapat dikurangi dan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi merupakan aspek fundamental pendidikan tinggi, yang berfungsi sebagai indikator mutu pendidikan yang diakui. Akreditasi memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Putri Safira Pitaloka, 2023).

Akreditasi, suatu bentuk jaminan mutu eksternal, secara formal mengakui kemampuan suatu institusi untuk

menjalankan kegiatan tertentu. Akreditasi melindungi masyarakat dari praktik penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, akreditasi memungkinkan universitas untuk memberikan pendidikan berkualitas yang selaras dengan tuntutan pasar kerja, sehingga mempersiapkan lulusan untuk karier yang sukses. Akreditasi juga memainkan peran penting dalam proposal proyek bagi institusi. Universitas dengan akreditasi A dapat mengusulkan proyek senilai miliaran atau jutaan, jauh lebih tinggi daripada universitas dengan akreditasi B atau C (Sawaji, 2019).

Oleh karena itu, Dengan kondisi banyaknya universitas-universitas di Sulawesi Selatan yang belum banyak mendapat akreditasi, para siswa dihadapi dengan permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, terutama perguruan tinggi swasta, calon mahasiswa kini memiliki banyak pilihan dalam memilih perguruan tinggi. Namun, menurut data yang tersedia (Kopertis Wil IX, 2010), jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setiap tahunnya jauh lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi swasta lainnya, meskipun karakteristik PTS-PTS tersebut relatif sama, seperti program studi yang ditawarkan dan

infrastrukturnya, termasuk gedung perkuliahan permanen, laboratorium, dan biaya kuliah (Sawaji, 2019).

Sektor jasa pendidikan tinggi dalam kerangka IA-CEPA dituangkan dalam LAMPIRAN 12-A: JADWAL PERPINDAHAN WARGA NEGARA AUSTRALIA KOMITMEN Bagian B. Pendidikan tinggi termasuk dalam Sektor/Subsektor golongan Sektor Jasa. Diperinci sebagai berikut, Layanan pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239) prioritas untuk program Sains, Teknologi, Teknik, Matematika, dan Bisnis Modern. Dalam kolom Syarat dan Batasan, tidak terdapat yang penting kecuali: Pimpinan lembaga pendidikan harus berkewarganegaraan Indonesia, jumlah pendidik wajib mencakup setidaknya 30% (tiga puluh persen) pendidik berkewarganegaraan Indonesia, dan minimal 80 persen pegawai selain pendidik dan pimpinan wajib berkewarganegaraan Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019).

Kemudian, sektor jasa pendidikan tinggi sudah dijelaskan terperinci dalam lampiran 12-A: JADWAL PERPINDAHAN WARGA NEGARA AUSTRALIA KOMITMEN Bagian B, munculah program-program hasil dari diratifikasinya IA-CEPA. Implementasi IA-CEPA sejauh ini ada sejumlah langkah-

langkah upaya seperti penghapusan tarif impor dan ekspor, mendorong investasi antar kedua negara, perdagangan barang dan jasa, kerjasama pada sejumlah sektor industri dan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia. Sejak diberlakukannya pada tahun 2020, Pemerintah kedua negara secara aktif mengadakan pertemuan bilateral untuk memastikan semua aspek perjanjian dijalankan sesuai rencana (Rahmawati, 2022). Ini termasuk penghapusan bertahap tarif impor dan ekspor, serta penerapan peraturan yang lebih ramah investasi Rissy (2021). Kedua negara juga membentuk komite bersama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IA-CEPA secara berkala.

Pertemuan bilateral secara rutin diadakan untuk memastikan penghapusan tarif impor dan ekspor berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, serta penerapan regulasi yang mendukung investasi yang lebih ramah. Satu dari sekian inisiatif utama dari implementasi ini adalah pembentukan Komite Bersama Pengawasan dan Implementasi IA-CEPA, yang bertugas memantau kemajuan implementasi, mengevaluasi dampak ekonomi perjanjian, menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul serta merekomendasikan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Komite ini juga berperan

dalam mempromosikan kesempatan bisnis yang muncul dari perjanjian itu, menciptakan landasan yang kuat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat antara kedua negara Nuranisa & Paksi (2022b)

Implementasi IA-CEPA di sektor jasa pendidikan tinggi antara lain Australia Awards Scholarships Indonesia, Pembukaan Perguruan Tinggi Asing, Program IA-CEPA ECP Katalis, Program *The Partnership For Australia – Indonesia Research* (PAIR) Di Sulawesi Selatan.

A. Australia Awards Scholarships Indonesia

Satu dari sekian langkah pertama dalam implementasi IA-CEPA di sektor jasa pendidikan adalah Kerjasama pendidikan dan pelatihan, melalui program seperti *Australia Awards Scholarships*, juga menaikkan kualitas tenaga kerja yang menarik bagi investasi di sektor pendidikan tinggi yang sesuai dengan konsep kerjasama pendidikan yang berhubungan dengan Hubungan Internasional Asrudin & Mirza Jaka Suryana (2009).

Keseluruhan program ini memastikan bahwa iklim investasi menjadi lebih menarik dan menguntungkan sehingga mendorong kedua negara untuk menaikkan investasi dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral Suryade et al. (2022).

Implementasi IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) memuat sejumlah inisiatif untuk menaikkan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia antara kedua negara seperti program pelatihan dan pendidikan vokasi yang bermaksud untuk menaikkan keterampilan tenaga kerja. Program-program seperti *Australia Awards Scholarships* dan Beasiswa Kemitraan Indonesia-Australia (AIYEP) memberikan kesempatan bagi warga Indonesia untuk menempuh pendidikan dan pelatihan di Australia, sementara program pertukaran pelajar dan magang seperti Indonesia-Australia Business Partnership Program dan pertukaran pelajar universitas memungkinkan mahasiswa dari kedua negara untuk mendapatkan pengalaman belajar dan kerja lintas budaya Vista et al. (n.d.).

Beasiswa Australia Awards merupakan penghargaan internasional bergengsi dari Pemerintah Australia yang ditujukan bagi calon pemimpin global untuk meraih gelar Master atau PhD di universitas-universitas Australia. Sejak 1953, beasiswa ini menjadi bagian utama dari program bantuan Australia di Indonesia. Melalui kesempatan belajar, melakukan penelitian, dan membangun jaringan, penerima beasiswa memperoleh

keterampilan dan wawasan untuk memacu perubahan serta mempererat hubungan antarwarga yang berkelanjutan dengan Australia. Beasiswa ini menawarkan berbagai manfaat yang mencakup dukungan bahasa Inggris dan akademik sebelum belajar di Australia, serangkaian pengembangan profesional, dan kegiatan jaringan yang akan memperkaya pengetahuan, pengalaman, dan jaringan para penerima beasiswa sebelum, selama, dan setelah masa studi. Oleh karena itu, sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian, lulusan dari penerima beasiswa ini mendapat rekognisi atau pengakuan karena berhasil lulus masa studinya.

Para pelamar dievaluasi dari segi keahlian profesional, keterampilan interpersonal, dan prestasi akademik, dengan fokus utama pada kemampuan mereka menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia. Program Beasiswa Australia Awards berupaya menciptakan keseimbangan peserta perempuan dan laki-laki serta mendorong pendaftaran dari beragam latar belakang. Kesempatan beasiswa prestisius ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Selain itu, beasiswa ini juga memberikan perhatian khusus pada

Kelompok Sasaran Ekuitas untuk mengurangi hambatan akses dan selaras dengan prioritas pembangunan kedua pemerintah. Kelompok tersebut mencakup penyandang disabilitas, perempuan dari latar belakang kurang beruntung, serta individu dari provinsi-provinsi yang menjadi fokus upaya pemerataan.

Dampak positif dari program-program ini dirasakan di kedua negara di Indonesia, kenaikan keterampilan tenaga kerja dan transfer pengetahuan berkontribusi pada produktivitas dan daya saing ekonomi. Sementara di Australia, akses ke tenaga kerja terampil dan diversifikasi ide mendorong inovasi serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Melalui IA-CEPA, kedua negara tidak hanya mengembangkan sumber daya manusia tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi yang saling menguntungkan. Sejumlah program ini menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap bersaing dalam ekonomi global . Dengan penekanan pada sektor investasi dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian Nuranisa & Paksi (2022b) menekankan pentingnya IA-CEPA secara strategis dalam pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi IA-

CEPA berhasil mendorong investasi dan kenaikan kapasitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan. Implementasi IA-CEPA juga memuat penguatan kerjasama di sejumlah sektor industri. Pemerintah kedua negara bekerjasama untuk menaikkan kapasitas industri dengan memperkenalkan teknologi dan praktik terbaik. Kerjasama ini terlihat jelas di sektor manufaktur, energi terbarukan, dan agrikultur, di mana kedua negara berbagi pengetahuan dan teknologi untuk menaikkan efisiensi dan produktivitas. Dalam rangka mendukung implementasi IA-CEPA, kedua negara melakukan perbaikan regulasi dan administrasi. Reformasi regulasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Prosedur administrasi disederhanakan untuk memudahkan perdagangan dan investasi. Hal ini memuat penyederhanaan izin usaha, pengurangan hambatan teknis, dan kenaikan transparansi dalam proses bisnis. Selain perdagangan barang, IA-CEPA juga fokus pada kenaikan perdagangan jasa. Implementasi perjanjian ini memuat pembukaan akses pasar untuk layanan profesional, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Penyedia layanan dari kedua negara bisa lebih mudah beroperasi di pasar satu sama lain. Hal ini memberikan

dorongan bagi sektor jasa di Indonesia dan Australia, membuka peluang baru dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

B. Pembukaan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Kedatangan universitas asing di Indonesia mampu menjembatani ketimpangan yang ada serta membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa lokal untuk memperoleh pendidikan bermutu di dalam negeri. Pemerintah telah memberikan izin kepada Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) untuk mendirikan kampus fisik di tanah air. Melalui upaya ini, pemerintah berambisi menjadi tuan rumah bagi universitas-universitas terkemuka dunia, demi meningkatkan reputasi di kancah pendidikan internasional sekaligus menegaskan bahwa ekonomi nasional telah memasuki fase modernisasi Lane (2011).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 53 Tahun 2018 menjadi acuan pertama yang memberi kewenangan bagi pendirian Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah menjelaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 bahwa PTLN dapat membuka kampus fisik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Setelah itu, ketentuan PTLN di KEK dalam Permenristekdikti No. 53/2018 dicabut dan diadopsi lebih rinci dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2021, yang mengatur Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan Pendidikan Formal di KEK. Dengan demikian, PTLN di KEK mengikuti persyaratan izin operasi dan standar akademik yang berbeda dan lebih ketat dibandingkan PTLN di luar KEK.

Meski terdapat beberapa perbedaan, seluruh Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) tunduk pada peraturan yang sama, yakni Permenristekdikti No. 53/2018. Sebagai contoh, setiap PTLN wajib menyediakan minimal dua program studi dalam bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) serta menyelenggarakan mata kuliah wajib nasional seperti Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan (Permendikbud No. 10/2021 menetapkan bahwa mata kuliah ini berlaku untuk jenjang sarjana). Selain itu, mutu pendidikan dan fasilitas di PTLN harus setara dengan yang ada di negara asal, dan lulusan PTLN memperoleh kualifikasi yang setara dengan institusi induknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PTLN di Indonesia membuka kesempatan bagi mahasiswa lokal untuk mengakses pendidikan kelas dunia tanpa harus belajar di luar negeri.

PTLN juga berpotensi meningkatkan daya saing serta memacu

perguruan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan mutu dan layanan mereka (Hou et al., 2018). Pasal 2 Permenristekdikti No. 53/2018 menyatakan bahwa pendirian PTLN bertujuan memperkuat daya saing lulusan dan institusi pendidikan tinggi Indonesia. Selain itu, kolaborasi antara universitas lokal dan PTLN dapat menumbuhkan hubungan yang memungkinkan peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi Indonesia (Sutrisno, 2019). Kehadiran PTLN diharapkan membawa dampak positif melalui kemitraan, seperti transfer pengetahuan, teknologi, keterampilan, serta adopsi inovasi (Farole, n.d.). Namun demikian, kerjasama antara PTLN di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan universitas dalam negeri masih terkendala karena tidak adanya regulasi akademik yang mengatur hal tersebut.

Salah satu implementasi dari IA-CEPA di sektor jasa pendidikan tinggi adalah pembukaan perguruan tinggi asing di kedua negara. Di Indonesia, pendirian perguruan tinggi asing diatur dalam banyak peraturan, antara lain:

- Pemerintah telah memberikan izin kepada perguruan tinggi luar negeri (PTLN) untuk membuka kampus fisik di Indonesia, sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 53/2018. Mengingat kualitas perguruan tinggi dalam negeri yang masih rendah akibat mutu pengajaran, penelitian, sumber daya manusia yang kurang, keterbatasan dana, dan tata kelola yang lemah, keberadaan PTLN di tanah air menawarkan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pendidikan bertaraf internasional tanpa harus ke luar negeri.

- Permenristekdikti No. 53/2018 menetapkan kewajiban bagi setiap PTLN untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal dalam bidang akademik, penelitian, dan inovasi. Namun, peraturan ini tidak berlaku bagi PTLN yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 10/2021. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan lancar meski tanpa regulasi khusus, Kemendikbudristek perlu mengambil inisiatif untuk memfasilitasinya.
- PTLN berpotensi mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam negeri serta menjadi mitra strategis untuk memperbaiki

mutu pendidikan tinggi dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Contohnya, kerjasama antara Monash University Indonesia dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah melahirkan berbagai kegiatan bersama, mulai dari penelitian hingga program mobilitas mahasiswa dan akademik, serta komitmen Monash University untuk mengembangkan talenta lokal di Provinsi Banten.

- Untuk memaksimalkan kontribusi PTLN di Indonesia, Kemendikbudristek perlu memfasilitasi kerjasama produktif antara PTLN dan perguruan tinggi dalam negeri. Upaya ini penting demi transfer ilmu dan teknologi sekaligus memperkuat ekosistem riset nasional melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perguruan tinggi lokal agar siap berkolaborasi dengan PTLN.
- Kemendikbudristek juga sebaiknya memasukkan PTLN dalam program-program pendidikan tinggi nasional, misalnya menjadikan PTLN sebagai tujuan beasiswa

pascasarjana dan program mobilitas, sehingga memperluas akses mahasiswa dan akademisi Indonesia terhadap pendidikan bertaraf dunia.

Studi Kasus: Monash University Indonesia

Meskipun gagasan pendirian kampus asing telah dibicarakan bertahun-tahun, realisasinya baru terlaksana setelah penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), diikuti oleh Monash University yang secara resmi mengumumkan rencana membuka cabang kampus di Indonesia. Dengan kehadiran Monash University Indonesia pada 2021, diharapkan institusi PTLN lain dapat membuka cabang di Banten maupun daerah lain, sehingga terbentuk pusat pendidikan yang menarik mahasiswa lokal dan internasional.

Sampai tahun 2022, Monash University Indonesia menyediakan program pascasarjana dan eksekutif di bidang Kebijakan Publik dan Manajemen, Ilmu Data, Desain Perkotaan, Bisnis dan Inovasi, Keamanan Siber, serta Kesehatan Masyarakat (Monash University Indonesia, t.t.). Beberapa jurusan ini belum ditawarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia,

sehingga menjadi pilihan menarik dengan biaya lebih terjangkau dibandingkan studi di luar negeri.

Pada Desember 2021, Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta) di Provinsi Banten menjalin kemitraan dengan Monash University Indonesia, meliputi kolaborasi riset, pertukaran sumber daya akademik, staf, dan mahasiswa, serta penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pengabdian masyarakat Untirta (2022a). Model kemitraan serupa telah diterapkan pada cabang kampus asing di Singapura, menjadi keunggulan kompetitif yang menonjolkan nilai jual institusi, sekaligus menarik siswa dan mitra kolaborasi (Olds, 2007).

MoU trilateral antara Monash University Indonesia, Untirta, dan Pemerintah Provinsi Banten juga ditandatangani pada periode yang sama, menegaskan komitmen Monash dalam mengembangkan talenta dan potensi lokal di Banten melalui program ketahanan dan diversifikasi pangan serta pengembangan wisata (Bappeda, 2021²). Bentuk nyata kolaborasi ini termasuk pengembangan produk pertanian lokal talas beneng oleh pusat penelitian Monash University Indonesia dan Untirta, serta program pengabdian masyarakat internasional di desa-desa Banten Untirta (2022b).

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kerjasama melampaui aspek akademik dan riset, dengan dampak positif pada masyarakat, penguatan keunggulan lokal, dan pertumbuhan ekonomi Banten. Hal serupa juga terbukti dalam studi kasus Pohl & Lane (2018) di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, bahwa kampus asing ikut mendorong percepatan riset dan perkembangan negara tuan rumah.

Di sisi lain, kemitraan dengan universitas lokal memberi keuntungan pada PTLN untuk tumbuh dan memperluas jangkauan di Indonesia. Wawasan dari mitra lokal membantu PTLN merancang kurikulum dan riset yang relevan dengan kondisi setempat, tanpa mengorbankan standar kualitas asalnya (Girdzijauskaite & Radzeviciene, 2014).

Menurut pernyataan Perwakilan Untirta (2022), kerjasama dengan Monash University Indonesia juga akan menjembatani hubungan mereka dengan kampus utama Monash, sehingga dapat mempromosikan kolaborasi pendidikan tinggi lintas batas secara lebih luas.

Namun, seperti yang diungkapkan Perwakilan Untirta (2022b), membangun dan mempertahankan kemitraan dengan universitas luar negeri memerlukan usaha ekstra, karena para staf dan akademisi harus memiliki kapasitas dan keterampilan

tertentu, misalnya kemampuan dasar berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan antar institusi. Pendapat ini selaras dengan pernyataan Fiona Hunter et al. (2018), yang menekankan pentingnya keterampilan berbahasa dan komunikasi efektif dalam lingkungan multikultural bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal universitas untuk meningkatkan paparan internasional menjadi krusial, terutama dengan proyeksi pendirian cabang universitas asing di Indonesia ke depannya.

Sesuai penjelasan di atas, pembukaan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PLTN) dapat menjadi sebuah kemitraan dengan banyak instansi dan tentunya perguruan tinggi dalam negeri, seperti kemitraan atau kerjasama UNTIRTA dengan Monash University.

C. Kemitraan Riset Program IA-CEPA ECP Katalis

Selain perdagangan barang, IA-CEPA juga fokus pada Program Katalis yang memperlihatkan hasil yang positif dalam sejumlah aspek, terlebih dalam kenaikan kapasitas industri, pengembangan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur ekonomi, dukungan untuk UMKM, promosi perdagangan dan investasi, serta kerjasama di sektor pertanian, perikanan, dan energi.

Program Katalis IA-CEPA ECP merupakan inisiatif pemerintah lima tahun yang dirancang untuk mengembangkan perdagangan dan investasi, serta memaksimalkan potensi kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Berjalan di bawah payung Program Kerjasama Ekonomi dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA ECP), Katalis melengkapi program pembangunan Pemerintah Australia yang sudah ada dengan pendekatan bilateral yang berfokus pada aspek komersial.

Katalis merupakan program penelitian berbasis konsorsium yang menggabungkan tiga hingga empat tim peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong kolaborasi riset antar-institusi dengan tema payung yang telah ditetapkan oleh DRTPM.

Katalis juga berfungsi sebagai skema kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia, bertujuan mengoptimalkan manfaat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (IA-CEPA) serta memperkuat dan memperluas kerjasama ekonomi yang inklusif. Diluncurkan pada Juli 2021, program ini memperoleh dukungan dana sebesar AUD 40 juta dari Pemerintah Australia melalui

Official Development Assistance (ODA) selama periode lima tahun hingga 2025.

Fokus utama Katalis adalah membuka peluang bisnis komersial dengan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia dan Australia, mengintegrasikan pasar secara lebih efektif, serta meningkatkan kompetensi untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Tujuan utama meliputi:

- Membangun jaringan peneliti di berbagai perguruan tinggi,
- Memperkuat kemampuan riset nasional,
- Meningkatkan jumlah publikasi dalam jurnal internasional bereputasi,
- Mengangkat kolaborasi riset Indonesia ke ranah global.

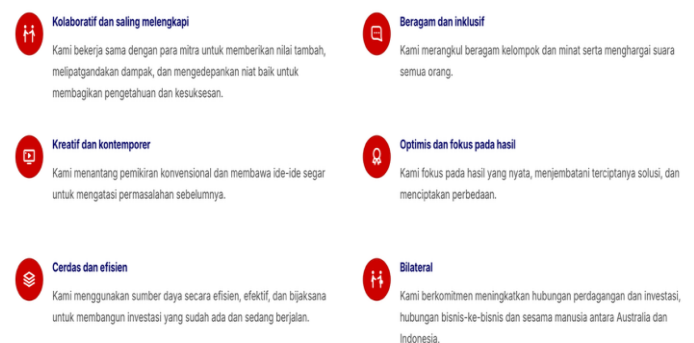
Katalis berfokus pada tiga area:

- Peningkatan kemampuan tenaga kerja di sektor bisnis dan pemerintahan agar produktivitas, kesetaraan gender, serta inklusi sosial meningkat pada tahun 2025
- Integrasi pasar yang lebih baik antara Indonesia dan Australia, mendorong kemitraan ekonomi baru yang inklusif pada tahun 2025

- Akses pasar yang lebih besar untuk bisnis Indonesia dan Australia pada tahun 2025

Nilai-nilai yang Katalis usung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.2: Nilai-nilai yang Katalis Usung



Sumber: Laman Katalis

Penerima (-penerima) manfaat adalah organisasi-organisasi yang memiliki ide peluang bisnis yang dapat memperoleh dukungan Katalis, dan yang akan memperoleh manfaat secara langsung dari hasil komersial. Biasanya, penerima manfaat langsung adalah dunia usaha, kelompok bisnis, organisasi bisnis, atau jenis organisasi lain di Australia atau Indonesia yang berkolaborasi mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan ide peluang bisnis bersama Katalis. Alih-alih memberikan dana kepada penerima manfaat secara langsung, Katalis

akan berkolaborasi bersama penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati.

Mitra (-mitra) pelaksana adalah para penyedia jasa yang dipilih Katalis untuk melaksanakan seluruh atau bagian tertentu dari kegiatan pendukung yang disepakati atas nama penerima manfaat. Mitra pelaksana dapat berupa konsultan perorangan, perusahaan konsultansi atau lembaga penelitian, atau penyedia jasa lain termasuk program-program yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Perbedaan utama antara penerima manfaat dan mitra pelaksana adalah, penerima manfaat tidak menerima dana secara langsung dari Katalis karena Katalis bukan merupakan program hibah. Katalis bekerjasama dengan penerima manfaat untuk menyetujui bagian mana dari kegiatan yang Katalis akan laksanakan dan bagian mana yang penerima manfaat akan berikan yang mungkin termasuk kontribusi non-finansial (natura). Pada sebagian besar kasus, Katalis akan melakukan proses pengadaan untuk memilih penyedia jasa pihak ketiga kemudian membuat perjanjian dengan mereka sebagai mitra pelaksana untuk melakukan pekerjaan yang disepakati atas nama, dan bekerjasama dengan, (para) penerima manfaat.

Keseluruhannya, perjanjian IA-CEPA telah memainkan peran penting

dalam mempererat kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, manfaat dari perjanjian ini tampak jelas melalui peningkatan volume perdagangan, arus investasi, terbukanya lapangan kerja baru, serta kemajuan sektor industri di kedua negara. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Utomo (2023), Nuranisa & Paksi (2022), Rusmin (2021), dan Julianisa, Priadarsini, & Sushanti (2023), menggarisbawahi pentingnya perjanjian ini dalam menaikkan kerjasama ekonomi, meskipun pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dari IA-CEPA.

Kemitraan yang telah dilakukan dalam program Katalis merupakan kemitraan yang bersifat kolaboratif untuk menyukseskan tujuan dari program Katalis.

Berkaitan dengan hal itu, evaluasi dan prospek kerjasama ekonomi Indonesia Australia pasca IA-CEPA membutuhkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan analisis kinerja perjanjian, respons pada tantangan ekonomi global dan regional, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, kedua

negara bisa mengoptimalkan manfaat dari kerjasama ekonomi dan memperkuat hubungan bilateral di masa depan.

Saat Joko “Jokowi” Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 2014, ia mengambil langkah berani dengan mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur. Setelah puluhan tahun terbentur kekurangan dana, Indonesia pun mengalami ketertinggalan yang signifikan dalam hal infrastruktur. Dalam rencana nasionalnya, ia menjadikan percepatan investasi infrastruktur sebagai prioritasnya. Ia berjanji untuk membangun jalan raya, jalan tol, dan rel kereta api sepanjang beberapa kilometer. Ia menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur pelabuhan, sektor pelayaran, serta pariwisata maritim untuk memperkuat konektivitas. Ia juga meningkatkan anggaran untuk jaringan distribusi dan menurunkan biaya logistik demi meningkatkan daya saing. Selain itu, lebih dari separuh anggaran nasional akan dialokasikan di luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sebagai negara kepulauan, tantangan utama Indonesia adalah menciptakan konektivitas yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota, desa dengan pulau-pulau lain kunci bagi pengentasan kemiskinan serta pembangunan pedesaan dan urbanisasi

berkelanjutan. Investasi pada infrastruktur yang menghubungkan kota besar, kota kecil, desa, dan pulau akan membuka peluang baru. Sinergi yang lebih kuat antara jalan raya, rel kereta, pelabuhan, dan bandara diharapkan dapat merangsang ekonomi lokal, meningkatkan arus komoditas, serta mentransformasi komunitas.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa tanpa pendekatan ‘berbasis masyarakat’ yakni berkelanjutan, terjangkau, dan mudah diakses manfaat konektivitas sering kali tidak dirasakan penduduk setempat. Misalnya, tanpa perencanaan infrastruktur yang baik, bisnis sulit memaksimalkan potensi transportasi. Begitu pula, konektivitas antarmoda dan penjadwalan yang buruk menghambat pemanfaatan jaringan. Di samping itu, masyarakat tetap dirugikan apabila tidak memiliki pengetahuan, akses ke sumber daya, atau keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang dan berwirausaha.

PAIR (*Connectivity, People, and Places*) adalah inisiatif pembangunan yang mempelajari dampak pembangunan fisik dan ekonomi di Indonesia. Pada 2019–2022, fokusnya adalah jaringan kereta Trans-Sulawesi. Pada 2024, Pemerintah berencana menuntaskan jalur kereta 145 km antara Makassar dan Parepare—bagian dari

prioritas pembangunan di Indonesia Timur dan menjadikan Sulawesi Selatan pintu gerbang kawasan. Bersamaan dengan itu, pelabuhan baru, kawasan industri, dan investasi terus berkembang.

PAIR menelaah konektivitas dan komunitas sepanjang koridor kereta ini: bagaimana penduduk merespons perubahan dan memanfaatkan peluang baru. Tujuan PAIR adalah mendukung pembangunan berkelanjutan melalui bukti ilmiah; hasil riset akan membantu merumuskan kebijakan serta menciptakan jaringan pengetahuan PAIR yang menjadi model bagi penelitian berbasis bukti untuk tantangan pembangunan kompleks.

Kegiatan PAIR meliputi empat bidang: komoditas, transportasi-logistik-rantai pasokan, kesehatan dan kesejahteraan kaum muda, serta pemberdayaan pemuda. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial, memusatkan kajian pada komoditas rumput laut dan jalur Makassar–Parepare. Fokus demografinya adalah kaum muda usia 16–30 tahun, kelompok terbesar di Indonesia.

Dengan meninjau satu komoditas dan mengaitkannya pada konektivitas transportasi baru serta kaum muda, PAIR mengevaluasi dampak peningkatan akses transportasi terhadap produktivitas pertanian, rantai nilai komoditas, dan

kesehatan, kesejahteraan, keterampilan, serta kewirausahaan masyarakat.

PAIR sejalan dengan inisiatif Pemulihan Australia pasca-COVID-19, menekankan intervensi berbasis bukti. PAIR juga mendukung Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017, RPJMN Indonesia 2020–2024, dan Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045, serta menanggapi tiga fokus Program Kerjasama Ekonomi IA-CEPA: akses pasar, integrasi pasar, dan peningkatan keterampilan

Kesimpulan

Implementasi IA-CEPA di sektor jasa pendidikan tinggi antara lain Australia Awards Scholarships Indonesia, Pembukaan Perguruan Tinggi Asing, Program IA-CEPA ECP Katalis, Program *The Partnership For Australia – Indonesia Research* (PAIR) Di Sulawesi Selatan. Dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam tulisan penelitian ini dapat dilihat bahwa kerjasama Indonesia memiliki progres yang sangat bagus. Perjanjian IA-CEPA merupakan salah satu perjanjian yang sangat menjadi prioritas Indonesia, khususnya di sektor jasa pendidikan tinggi dari tahun 2020-2024.

Penelitian bisa memperluas analisisnya pada sektor jasa pendidikan

tinggi untuk menggali lebih lanjut peluang kerjasama yang dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Evaluasi terhadap dampak sosial dari IA-CEPA, seperti penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap perjanjian IA-CEPA di sektor jasa pendidikan tinggi dan program PAIR di masa yang akan datang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam mengkaji yang kerjasama antara Indonesia dan Australia, khususnya di sektor jasa pendidikan tinggi, serta bagaimana kebijakan yang lebih terfokus dapat mengatasi isu-isu tersebut.

Referensi

- Alfiano, J., Hergianasari, P., Simanjuntak, T. R., & Fahmi, M. (2022). Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia Melalui Program Ausaid Di Sektor Pendidikan Era Jokowi Pada Tahun 2014-2019. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(7), 772–783. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i7.445>
- Amalia, R. M., Ampera, T., & Risagarniwa, Y. Y. (2019). Positive Reaction Toward Trade and Economic Partnership Between Indonesia and Australia Governments in the Jakarta Post. *Intermestic Journal of International Studies*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n1.2>
- Anfasa, F. A. (2023). Resiprositas Indonesia Dan Australia Dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021. *Ecoplan*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.622>
- Asrudin, & Mirza Jaka Suryana. (2009). *Refleksi teori hubungan internasional: dari tradisional ke kontemporer* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Australia-Indonesia Centre. (n.d.). *PAIR-Annual-report-2021-2022-English*.
- Chowdhury, M. B. (2021). Internationalisation of Education and Its Effect on Economic Growth and Development. *World Economy*, 45(1), 200–219. <https://doi.org/10.1111/twec.13174>
- Dugis, V. M. (2017). Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 309. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.309-324>
- Dwisia Julianisa, K., Wayan, N., Priadarsini, R., Sushanti, S., & Internasional, H. (2023). Faktor Pendorong Indonesia Menyetujui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). In *Online) DIKSHI* (Vol. 3, Issue 1).
- Fatje Bawotong, J., Aprina, E., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Balikpapan, K., & Timur, K. (2022). Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Challenges and Obstacles of Indonesia Post-Ratification of the Agreement Partnership Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. *Jurnal de Jure*, 14(1). <https://www.ceicdata.com/id/indicator/australia/population>
- Ghafur Dharmaputra. (2016). Studi Banding FTA- CEPA: Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Untuk Perundingan CEPA. In *Lokakarya Perspektif Indonesia*

- untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (Vols. 1–2, p. 2).
- Hardwick-Franco, K. G. (2017). Music Education in Remote Rural South Australian Schools: Does a Partnership With a Non-Government Organisation Work? *Australian and International Journal of Rural Education*, 28(1), 104–120. <https://doi.org/10.47381/aijre.v28i1.161>
- Herlina, A. (2021). Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *Neorespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.52423/neores.v2i2.16226>
- Kapitzke, C., & Hay, S. (2011). School Education as Social and Economic Governance: Responsibilising Communities Through Industry-school Engagement. *Educational Philosophy and Theory*, 43(10), 1103–1118. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00679.x>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *IA-CEPA-TEXT-AGREEMENT-2019*.
- KEVIN EVANS. (2025). *WAWANCARA MR. KEVIN EVANS (DENGAN INDONESIA DIRECTOR OF THE AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE)*.
- Lane, J. E. (2011). Importing Private Higher Education: International Branch Campuses. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 13(4), 367–381. <https://doi.org/10.1080/13876988.2011.583106>
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mahfud, H., Roslan, R., Chaeroh, M., Elita, M. D., & Fauziah, M. (2021). The Comparison of Education System in Australia and Indonesia. *Jpi (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(4). <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i4.33661>
- Marisa, A. (2020). *HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA: KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM MERATIFIKASI INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TAHUN 2019*. 4(1).
- Michie, M. (2019). Perbandingan Kurikulum 2013 Indonesia Dengan Kurikulum Australia Dengan Fokus Pada Ilmu Pengetahuan Alam. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(2), 257–268. <https://doi.org/10.17509/jpp.v19i2.19770>
- Novalisa Tabisu, H., Tehupeior, A., & Napitupulu, D. R. W. (2021). Analisis Perjanjian Internasional dan Dampak Terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia-Fiji. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11), 2083–2095. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.339>
- Nuranisa, S. A., & Paksi, A. K. (2022). Peran Strategis Kerjasama IA-CEPA Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 192–202. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47310>
- Pasiningsih. (2021). Family-School Partnerships of Indonesian Families Engaged in Postgraduate Study. *Jiv-Jurnal Ilmiah Visi*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/jiv.1601.1>
- Pratama, A. (2024). The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities. *Audito Comparative Law Journal (Aclj)*, 5(1), 18–32.

- <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644>
- Pratama, A., & Yuliana, G. (2024). The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 5(1), 18–32. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644>
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. (2013). *LAPORAN HASIL KAJIAN Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral*.
- Putri Safira Pitaloka. (2023, September 2). 30 Persen Kampus di Makassar Belum Dapat Akreditasi, Apa Penyebabnya? https://www.tempo.co/politik/30-persen-kampus-di-makassar-belum-dapat-akreditasi-apa-penyebabnya--160359#goog_rewarded
- Rissy, Y. Y. W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ia-Cepa). *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–198. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198>
- Sawaji, J. (2019). Dampak Citra Perguruan Tinggi Guna Meningkatkan Motivasi, Sikap, dan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Memilih PTS di Sulawesi Selatan. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS*, 6(2), 23–30. <https://doi.org/10.33096/jmb.v6i2.306>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Suryade, L., Akhmad Fauzi, Noer Azan Achsani, & Eva Anggraini. (2022). Variabel-Variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(1), 16–30. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.327>
- Susanto, D. A. (2019). Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia Dalam Kerja Sama IACEPA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 13(1), 21–46. <https://doi.org/10.30908/bilp.v13i1.334>
- Tyushka, A., & Czechowska, L. (2019). Strategic partnerships, international politics and IR theory. In *States, International Organizations and Strategic Partnerships* (p. 548). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788972284.00010>
- Utomo, N. B. (2023). ANALISIS DAMPAK KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA CEPA) TERHADAP NERACA PERDAGANGAN. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 7(2), 406–418. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2526>
- Vista, V., Arie, M. ;, Paksi, K., Muhammad, ;, & Hanggariksa, D. (n.d.). *Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Australia-China Trade Tensions During the Covid-19 Pandemic: Australia's Reaction to China Trade Sanctions*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4293>
- Wilman Juniardi, & Fiktor Piawai, S. Pd. , M. E. (2023, January). *Pengertian Kerjasama Ekonomi Internasional*,

Tujuan, dan Contohnya.
<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/kerjasama-ekonomi-internasional/>

- WULANDARI, A. R., & Suryadipura, D. (2021). Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33521>
- Yudhistira Nugroho, A., & Esther, N. (n.d.). *Cooperation the Governments of Indonesia and Australia Improves the Quality of Human Resources Through the Australia Awards Scholarship Program 2017-2022*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5990>